

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sifat dan dinamika ancaman terhadap negara, sehingga masalah keamanan menjadi semakin kompleks. Ancaman kontemporer tidak hanya muncul dalam bentuk agresi militer konvensional, tetapi juga telah berubah menjadi ancaman hibrida yang menggabungkan berbagai metode, termasuk pemanfaatan domain digital. Dalam konteks ini, disinformasi dan manipulasi opini publik menjadi contoh ancaman yang sering digunakan untuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu atau kebijakan. Ancaman berbasis informasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius. Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan berpotensi memicu polarisasi, memperkeruh situasi sosial, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Apabila kepercayaan publik menurun, maka legitimasi kebijakan pemerintah juga dapat terganggu, karena kebijakan yang diterapkan cenderung sulit diterima dan didukung oleh masyarakat secara luas.



**Gambar 1.1** Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia

*Sumber: APJII, 2025*

Kondisi ini semakin relevan bagi Indonesia mengingat tingkat keterhubungan digital masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Akses internet yang semakin luas dan penggunaan media sosial yang tinggi membuat arus informasi bergerak sangat cepat, namun tidak selalu diikuti oleh kemampuan literasi digital yang memadai. Akibatnya, ruang informasi menjadi lebih rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membentuk persepsi publik, memperbesar konflik sosial, atau menekan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ancaman hibrida di ruang informasi penting untuk memperkuat strategi pertahanan negara yang sesuai dengan dinamika era digital, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang komprehensif, ancaman berbasis informasi dapat dikelola secara lebih efektif guna menjaga ketahanan nasional. Survei APJII 2025 (sebagaimana diringkas oleh beberapa publikasi berbasis data) mencatat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 80,66% pada 2025; peningkatan ini memperbesar peluang partisipasi publik, namun sekaligus memperluas ruang kompetisi narasi dan misinformasi di ranah komunikasi publik. (Goodstats, 2025).

Indonesia mengadopsi prinsip sistem pertahanan universal dalam kerangka kebijakan nasionalnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional menegaskan bahwa pelaksanaan pertahanan nasional mencakup seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan ini dibentuk secara proaktif dan dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, terencana, dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap negara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Wikisource, 2002) . Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional menekankan bahwa pengelolaan sumber daya nasional bertujuan untuk mengubah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta fasilitas dan infrastruktur nasional menjadi kekuatan pertahanan yang siap untuk deployment dan pemanfaatan yang efektif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019).

Kerangka pertahanan dan keamanan nasional Indonesia didasarkan pada prinsip Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Universal (Sishankamrata). Konsep ini merupakan doktrin dan strategi keamanan nasional yang mengintegrasikan semua sumber daya dan kemampuan nasional, mencakup aspek militer dan non-militer, secara holistik dan kohesif. Sishankamrata beroperasi sebagai taktik pencegahan yang ditandai dengan dimensi populis, teritorial, dan universal, melibatkan semua unsur bangsa. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nasional Indonesia (Polri) melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat universal sebagai kekuatan utama, didukung oleh dukungan aktif masyarakat sebagai kekuatan tambahan, sejalan dengan inisiatif perlindungan dan keamanan nasional. TNI, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bertindak sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan dan integritas wilayah negara. Kepolisian Nasional Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan melindungi, membina, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, meluncurkan Program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional, Komponen Cadangan merupakan bagian dari sumber daya nasional yang diorganisir dan siap dikerahkan untuk memperkuat komponen utama pertahanan nasional. Pengelolaan Komponen Cadangan harus mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, pertimbangan hukum, keprihatinan masyarakat, serta hak dan kewajiban individu Komcad untuk memastikan kejelasan hukum dalam hal pelatihan, penggunaan, pasca-penggunaan, dan aspek yudisial. Untuk meningkatkan operasi pertahanan nasional, pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan Indonesia, mendirikan dan mengembangkan Komponen Cadangan (Komcad). Metode pembentukan, pendirian, dan

promosi Komcad diatur, di antara peraturan lain, oleh Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Inisiatif Komcad telah menunjukkan pencapaian konkret dalam praktik. Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa angkatan pertama anggota Komcad pada tahun 2021 terdiri dari 3.103 orang, angkatan berikutnya pada tahun 2022 mencakup 2.500 orang, dan pada tahun 2023 akan ada 2.500 orang, sehingga total anggota Komcad yang dipilih untuk periode 2021-2023 mencapai 8.103 orang. (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2023).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara harapan normatif kebijakan dan realitas di lapangan. Secara ideal, Program Komponen Cadangan yang digagas oleh Kementerian Pertahanan diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat sebagai bagian dari penguatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Program ini dirancang sebagai instrumen partisipasi warga negara dalam upaya bela negara yang bersifat sukarela, terstruktur, dan berbasis regulasi yang jelas. Harapannya, masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, mekanisme, hak dan kewajiban peserta, serta posisi Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan nasional.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat substansi Program Komponen Cadangan. Sebagian masyarakat masih menyamakan Komcad dengan wajib militer, memandangnya sebagai bentuk militerisasi sipil, atau belum mengetahui mekanisme rekrutmen serta batasan penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah komunikasi antara pembuat kebijakan dan publik sasaran. Dengan kata lain, terdapat gap antara ekspektasi pemerintah agar program dipahami sebagai kebijakan strategis pertahanan yang partisipatif, dengan kenyataan bahwa pemahaman publik masih beragam dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan tersebut.

Capaian tersebut juga berjalan beriringan dengan dinamika persepsi publik. Pada fase awal rekrutmen, kanal resmi Komcad

Kementerian Pertahanan mengutip pemberitaan media bahwa pendaftar Komcad gelombang pertama “hampir 10.000 orang”, yang menunjukkan antusiasme publik sekaligus besarnya perhatian masyarakat terhadap program ini. (Kementerian Pertahanan RI, 2023) Dalam konteks komunikasi publik, tingginya atensi terhadap Komcad dapat menjadi peluang membangun dukungan dan legitimasi sekaligus tantangan seperti munculnya salah tafsir, resistensi, maupun isu-isu seperti penyamaan Komcad dengan wajib militer. Ketika isu pertahanan masuk ke ruang digital yang cepat, kompetitif, dan rawan misinformasi, kebutuhan akan komunikasi yang terencana, konsisten, dan berbasis tujuan menjadi semakin penting.

Di sinilah komunikasi strategis punya posisi krusial, karena kebijakan pertahanan termasuk Komponen Cadangan (Komcad) beroperasi di ruang publik yang sensitif dan mudah memunculkan pro-kontra. Di era platform digital, pemahaman masyarakat sering terbentuk dari potongan informasi, framing media, atau konten viral, bukan dari pembacaan regulasi dan dokumen kebijakan yang utuh. Dalam situasi seperti ini, kalau institusi tidak memegang kendali atas cara kebijakan dijelaskan, “ruang makna” Komcad bisa diisi oleh salah tafsir seperti penyamaan dengan wajib militer, kecurigaan, atau disinformasi yang berujung pada turunnya kepercayaan publik. OECD juga menekankan bahwa meskipun teknologi digital membuat komunikasi semakin mudah, banyak pemerintah justru masih sering “kehilangan kesempatan” untuk berkomunikasi dan melibatkan warga secara efisien padahal komunikasi publik yang baik berkontribusi pada kepercayaan warga dan kualitas kebijakan di lingkungan informasi yang makin kompleks. (OECD, 2021).

Dikutip dari Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto dan Lukman Yudho Prakosa (2021), meskipun program komcad memiliki landasan hukum dan tujuan strategis yang jelas, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi pemahaman publik. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi keliru yang menyamakan komponen cadangan dengan wajib militer. Dalam

menerapkan sistem baru, seringkali terjadi kejadian tak terduga, beberapa di antaranya perlu dipantau dengan cermat, terutama yang negatif. Setelah pembentukan komcad, beberapa potensi efek samping negatif telah muncul, misalnya seperti, pendekatan bergaya militer oleh personel komcad, biaya yang tidak sebanding dengan manfaat, penolakan dari individu atau organisasi, penggunaan komcad sebagai alat politik baru, kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kebijakan pertahanan itu sendiri, melainkan pada proses komunikasi kebijakan kepada publik.

Secara konseptual, komunikasi strategis dipahami sebagai penggunaan komunikasi yang disengaja (*purposeful*) oleh organisasi untuk memenuhi misi atau tujuan organisasi, serta dipraktikkan secara terintegrasi dan lintas fungsi bukan kerja satu unit saja dengan menautkan analisis situasi, perumusan tujuan, penyusunan pesan, pemilihan kanal, sampai evaluasi secara sistematis. (Hallahan dkk, 2007). merumuskan komunikasi strategis sebagai kerangka yang menyatukan berbagai praktik komunikasi organisasi seperti public relations, komunikasi organisasi, komunikasi publik agar komunikasi menjadi instrumen pencapaian tujuan, bukan sekadar aktivitas informasi. (Hallahan et al., 2007: 3–5). Dalam konteks Komcad, implikasinya adalah komunikasi Kemhan tidak cukup berhenti pada “publikasi kegiatan” (rilis penetapan, dokumentasi latihan), tetapi harus memastikan publik memahami inti kebijakan melalui narasi yang konsisten dan mudah dicerna: apa Komcad, mengapa diperlukan dalam kerangka pertahanan semesta, dan bagaimana mekanisme serta batasannya berjalan. Pada saat yang sama, komunikasi strategis perlu dirancang sesuai segmentasi khalayak calon peserta, keluarga peserta, masyarakat umum, dan media karena kebutuhan informasi dan sensitivitasnya berbeda; tanpa segmentasi, pesan rawan terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. (Hallahan et al., 2007: 6–9).

Selain membangun pemahaman dan legitimasi, komunikasi strategis juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi isu atau krisis dan klarifikasi mis/disinformasi agar kebijakan tidak “dikalahkan” oleh rumor.

OECD merumuskan prinsip praktik baik untuk respons komunikasi publik pemerintah terhadap mis- dan disinformasi, yang pada intinya menekankan perlunya pendekatan terstruktur, kolaboratif, berbasis bukti, dan transparan dalam menghadapi manipulasi informasi. (OECD, 2024). Sejalan dengan itu, WHO menekankan pentingnya membangun kapasitas jangka panjang untuk *risk communication*, *community engagement*, dan *infodemic management* (RCCE-IM) sebagai bagian dari *preparedness* dan respons kedaruratan, karena sistem komunikasi yang kuat membantu publik mengakses informasi resmi yang jelas sekaligus menyediakan jalur umpan balik dari masyarakat. (WHO Regional Office for Europe, 2024).

Penelitian ini sangat penting mengingat peran Program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai alat strategis dalam mengelola sumber daya militer nasional, yang memerlukan dukungan publik dan kolaborasi berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan bertujuan untuk mengubah sumber daya menjadi kekuatan pertahanan operasional yang dilengkapi secara memadai sebelumnya untuk menghadapi ancaman yang beragam. Klausul ini menunjukkan bahwa peningkatan kesiapan nasional tidak hanya dipandang sebagai inisiatif militer teknologi, tetapi juga sebagai tujuan sosial yang memerlukan pemahaman, penerimaan, dan keterlibatan publik. Oleh karena itu, fungsi komunikasi pemerintah, terutama komunikasi strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan Komcad dipahami sesuai dengan tujuannya, memperoleh legitimasi sosial, dan mengurangi potensi penolakan yang timbul dari persepsi yang beragam di masyarakat.

Alasan ini diperkuat oleh penyebutan eksplisit kegiatan komunikasi dalam mekanisme program sebagaimana diatur dalam peraturan yang menetapkan Komcad. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 mengatur prosedur pembentukan Komcad melalui pendaftaran dan seleksi, serta mewajibkan pemberitahuan pendaftaran disebarluaskan melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial,

disertai dengan batas waktu yang jelas. Kesuksesan program tidak hanya bergantung pada pelaksanaan seleksi dan pelatihan, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk mengelola pesan (baik substansi maupun narasi), memilih saluran yang tepat, menetapkan jadwal komunikasi, dan memastikan koordinasi antar unit untuk memastikan informasi yang disebarkan kohesif dan akurat. Pada titik ini, penelitian mengenai manajemen komunikasi strategis menjadi relevan untuk menilai aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pendistribusian, dan evaluasi komunikasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan dalam program Komcad, termasuk tata kelola isu, konsistensi narasi, dan indikator efektivitas komunikasi.

Di sisi lain, lingkungan komunikasi kontemporer memperbesar risiko distorsi informasi terhadap kebijakan pertahanan. Pemerintah melalui kanal resminya menekankan bahwa disinformasi perlu ditangani secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, karena dampaknya dapat mengganggu kepercayaan publik. Dalam konteks kebijakan pertahanan, risiko disinformasi memiliki konsekuensi yang lebih sensitif. Kesalahpahaman dapat berkembang menjadi penolakan sosial, stigma, atau delegitimasi kebijakan yang menghambat partisipasi. Selain itu, pemerintah juga mengakui tantangan komunikasi kebijakan publik pada era *post-truth*, di mana pengelolaan komunikasi menjadi faktor kunci untuk membangun partisipasi bermakna, rasa memiliki, serta kepercayaan publik terhadap kerja-kerja pemerintah. Artinya, penelitian ini penting untuk menguji bagaimana Kementerian Pertahanan mengelola komunikasi program Komcad dalam kondisi arus informasi yang cepat, kompetisi narasi di ruang digital, dan kebutuhan membangun kepercayaan publik.

Urgensi penelitian juga tampak dari arah kebijakan yang menempatkan penguatan Komcad sebagai prioritas penguatan sistem pertahanan semesta pada periode perencanaan nasional 2025–2029, yang ditandai dengan adanya rapat koordinasi dan penekanan institusional terhadap program Komcad dan Komponen Pendukung. Ketika sebuah

program menjadi prioritas, kebutuhan terhadap evaluasi berbasis bukti meningkat, termasuk evaluasi terhadap strategi komunikasi yang digunakan untuk mendukung implementasi. Secara akademik, penelitian ini diperlukan untuk memperkaya kajian komunikasi strategis pada ranah kebijakan publik dan pertahanan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam manajemen komunikasi seperti pemetaan audiens, perumusan pesan, pemilihan media, koordinasi internal, dan evaluasi. Sebagaimana ditekankan dalam literatur perencanaan dan strategi komunikasi.

Dengan demikian, komunikasi strategis Komcad idealnya bukan komunikasi yang reaktif saat isu membesar, melainkan komunikasi yang direncanakan sejak awal, konsisten lintas kanal, dan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemahaman serta kepercayaan publik. Sejumlah kajian akademik juga menegaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan bagian dari penguatan pertahanan semesta yang berlandaskan UU 23/2019 dan terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara. Artinya, Komcad bukan sekadar program pelatihan, tetapi bagian dari desain ketahanan nasional yang menuntut dukungan sosial-politik, termasuk melalui komunikasi kebijakan yang kredibel. (Udayana & Wilopo, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan Komcad sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, organisasi, dan pelatihan, tetapi juga oleh bagaimana Kementerian Pertahanan mengelola komunikasi strategis program Komcad, mulai dari perumusan pesan, konsistensi narasi, pemilihan saluran komunikasi, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga respons terhadap isu di ruang publik. Dengan menganalisis komunikasi strategis Komcad pada Kementerian Pertahanan, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan literatur komunikasi strategis sektor publik sekaligus memberi masukan praktis bagi perbaikan komunikasi kebijakan pertahanan agar lebih efektif, partisipatif, dan adaptif di era informasi. (Hallahan et al., 2007).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen komunikasi strategis Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Komponen Cadangan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta?
2. Faktor apa yang menghambat manajemen komunikasi strategis Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Komponen cadangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana manajemen komunikasi strategis Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Komponen Cadangan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat manajemen komunikasi strategis Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Komponen Cadangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penulisan Penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang manajemen komunikasi strategis di sektor publik dan komunikasi kebijakan di bidang pertahanan. Temuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual tentang penerapan prinsip-prinsip komunikasi strategis dalam konteks kebijakan pertahanan yang sensitif, mencakup perencanaan komunikasi, penetapan tujuan, formulasi pesan dan narasi, pemilihan media, serta pengelolaan isu dan disinformasi di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk berfungsi sebagai acuan akademik bagi

studi serupa dan memperkuat kerangka teoritis komunikasi strategis, terutama di dalam organisasi negara.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk membantu Kementerian Pertahanan Indonesia dalam mengawasi komunikasi strategis terkait pelaksanaan Program Komponen Cadangan dalam kerangka Sistem Pertahanan Rakyat Universal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan konsistensi narasi pesan dan kebijakan, ketepatan segmentasi target komunikasi termasuk calon peserta, keluarga mereka, masyarakat umum, dan media serta efektivitas pemilihan dan integrasi saluran komunikasi yang digunakan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Pertahanan dalam mengidentifikasi, memprediksi, dan menangani berbagai masalah, kesalahpahaman, dan disinformasi di ruang publik, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Komponen Cadangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada Sistematika penulisan skripsi ini mencakup lima bab yang disusun secara relevan, didahului oleh bagian awal yang meliputi cover, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, sebagai kerangka dan pedoman penyusunan skripsi secara menyeluruh.

#### 1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai landasan dan fokus penelitian.

#### 2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretis yang mendukung topik penelitian, serta kajian konseptual atau kerangka pemikiran. Bab ini disusun sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi dan kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan mengenai manajemen komunikasi strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dalam penyelenggaraan Program Komponen Cadangan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada temuan penelitian kualitatif yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi komunikasi strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait manajemen komunikasi strategis Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Komponen Cadangan, sedangkan saran disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan manajemen komunikasi strategis pada masa yang akan datang.